

# Ganjalan Ambang Batas Parlemen

**A**DANYA usulan ambang batas keterwakilan di parlemen (*parliamentary threshold/PT*) sebesar 5 persen dalam pemilu mendatang, setidaknya akan membuat sistem politik nasional menjadi lebih ideal, efektif, dan efisien. Usulan PT 5 persen tentunya jangan disalahtafsirkan sebagai kuburan partai politik kecil. Usulan tersebut hendaknya dipandang sebagai langkah menuju pembenahan dalam sistem perpolitikan nasional dan bukan sebagai membunuh karakter partai kecil yang selama ini dikhawatirkan.

Angka usulan PT 5 persen dewasa ini mulai berkurang menjadi 4 persen, sementara partai partai kecil bertahan di 3 persen. Bagaimana jika diambil jalan tengah ketika partai besar semula mengusulkan 5 persen, partai kecil 3 persen dijumlahkan saja lantas dibagi dua menjadi 4 persen?

Bila itu terwujud dengan besarnya angka PT sebesar 4 persen, maka jumlah partai politik yang akan masuk ke parlemen semakin sedikit. Dengan demikian, jumlah partai politik yang terbatas itu, dapat dimungkinkan bahwa sistem presidensial yang digunakan akan mendorong roda pemerintahan berjalan efektif dan efisien.

Saatnya dalam parlemen itu hanya ada lima sampai tujuh partai saja dan sudah cukup mewakili seluruh elemen masyarakat Indonesia yang heterogen.



**Dadang Iskandar**

Dosen Kopertis IV Jabar Banten  
dpk FKIP Unpas Bandung

Jangan seperti sekarang ini, jumlah partai banyak, fraksinya juga banyak, sehingga koalisi partai pun menjadi tak jelas arahnya dan cenderung kental kepentingan kelompok tertentu. Bahkan, dari kondisi saat ini, terganggunya efektivitas jalannya roda pemerintahan lebih disebabkan banyaknya jumlah partai politik yang memiliki kursi perwakilan di parlemen ketimbang banyaknya jumlah parpol yang mengikuti pemilihan umum. Jadi usulan adanya penyederhanaan partai politik perlu diapresiasi.

Kita berharap bahwa munculnya perbedaan atas keinginan penetapan jumlah PT antara partai besar dan partai menengah, juga tidak diartikan sebagai alas jual beli politik. Semoga, Pansus RUU Pemilu mampu lebih mendalami serta mengkaji secara ilmiah masalah tersebut sehingga dapat mengeluarkan keputusan yang bisa diterima akal sehat oleh semua komponen bangsa.

Ketika kemudian muncul pertanyaan, menetapkan nilai ambang batas elektoral (*electoral threshold*) akan membatasi orang mendirikan parpol dan itu pelanggaran konstitusi. Itu sebabnya, pembatasan akan lebih baik dilakukan melalui penetapan nilai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Meski akhirnya akan berujung pada penyederhanaan parpol, hal itu akan berdampak positif bagi ketatanegaraan dan mempertegas jenis kelamin parpol.

Usulan konfederasi merupakan pilihan politik yang harus ditempuh, walau akan menemui berbagai kendala, terutama menyangkut konstitusional dan yuridis perundang-undangan. Konstitusi Indonesia tidak mengenal adanya gabungan partai politik atau konfederasi selain dalam proses pemilihan presiden.

Kuncinya kini tinggal komunikasi politik antarparpol, baik yang mengusung kebijakan peningkatan *parlia-*

*mentary threshold*, maupun penggabungan parpol lewat konfederasi. Yang jelas harus mencari solusi politik sama-sama. Perlu diingat, konstituen sudah melek politik dan jauh lebih fleksibel dalam menentukan pilihan partai politik mereka saat pemilu. Artinya, setiap konstituen akan lebih jeli terhadap partai politik dan tentunya akan lebih memilih yang mereka anggap punya ideologi berdekatan dengan parpol pilihan sebelumnya.

Rakyat saat ini sudah cerdas memilih. Rakyat sudah mengetahui dunia politik dan isinya. Rakyat sudah dapat melihat partai politik mana saja yang bisa bekerja dan rakyat tidak akan mudah dijejek oleh opini pencitraan.

Jika ditelaah kembali, partai-partai menengah ke bawah itu rupanya tidak yakin diri. Angka 4 persen PT dianggap sebagai hal yang menakutkan. Sangat dalam penyederhanaan parpol adalah secara alamiah. Banyak parpol dan caleg hebat, tetapi tidak masuk di parlemen hanya gara-gara parpolnya tidak lolos angka ambang batas di parlemen. Mengapa tidak bergabung? Bukankah perbedaan satu parpol dengan parpol lainnya sangat tipis? Bukankah ideologinya nyaris sama dan yang membedakan hanya pemimpin parpol-parpolnya saja? Hal ini perlu direnungkan jika itu semua untuk kepentingan bangsa di masa depan. \*\*\*